

Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit Sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* Dalam Rangka Peningkatan Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Pemerintah

Oleh :

Ubaidillah¹⁾

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
Email : ubaidillah@gmail.com

Ermadiani²⁾

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Abdul Rohman³⁾

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Info Article :

Diterima : 09 Januari 2020

Direview : 13 Januari 2020

Disetujui : 15 Mei 2020

ABSTRACT

The current National Health Insurance fund policy invites many problems in its implementation. JKN funds leakage caused various government efforts to minimize it through fraud prevention. Management Information System Development can minimize this so that good public service governance can be created over the implementation of JKN funds in government hospitals in the South Sumatra Region through transparency and accountability. This study aims to prove that the Development of Management Information Systems influences the Governance of Public Services at Government Hospitals in the South Sumatra Region through fraud prevention. The results of the study said that the Development of Management Information Systems which is proxied by the Innovation of Management Information Systems affects the Governance of Public Services

Keywords : **Management Information Systems, Fraud Prevention, Public Service Governance, National Health Insurance, Government Hospitals**

ABSTRAK

Kebijakan dana Jaminan Kesehatan Nasional saat ini mengundang banyak permasalahan dalam implementasinya. Kebocoran dana JKN menyebabkan berbagai upaya pemerintah untuk meminimalisir nya melalui pencegahan fraud. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dapat meminimalisir hal tersebut sehingga dapat tercipta Tata Kelola Pelayanan Publik yang baik atas pelaksanaan dana JKN pada Rumah Sakit pemerintah di Wilayah Sumatera Selatan melalui transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa Pengembangan Sistem Informasi Manajemen berpengaruh terhadap Tata Kelola Pelayanan Publik pada Rumah Sakit pemerintah di Wilayah Sumatera Selatan melalui pencegahan *fraud*. Hasil Penelitian mengatakan bahwa Pengembangan Sistem Informasi Manajemen yang diprosikan dengan Inovasi Sistem Informasi Manajemen berpengaruh terhadap Tata Kelola Pelayanan Publik

Kata Kunci : **Sistem Informasi Manajemen, Pencegahan Kecurangan, Tata Kelola Pelayanan Publik, Jaminan Kesehatan Nasional, Rumah Sakit Pemerintah**

PENDAHULUAN

Korupsi dan kecurangan (*fraud*) adalah masalah global yang harus menjadi keprihatinan semua orang. Praktik *fraud* biasanya sejajar dengan konsep pemerintahan totaliter, diktator yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang. *Fraud* juga berkaitan dengan pelanggaran HAM. Peluang terbesar untuk membuka praktik *fraud* ada pada sistem pemerintahan yang demokratis. Asumsinya, praktik *fraud* berpeluang besar dibongkar dalam lingkungan yang plural, toleran, masyarakat memiliki kebebasan menyampaikan pendapat, dan ketika semua orang merasa aman-tidak ada ancaman, dan tekanan secara sosial maupun politis. Dalam konteks perjalanan bangsa Indonesia, persoalan *fraud* memang telah mengakar dan membudaya. Bahkan dikalangan mayoritas pejabat publik, tak jarang yang menganggap *fraud* sebagai sesuatu yang “lumrah dan Wajar”. Ibarat candu, *fraud* telah menjadi barang bergensi, yang jika tidak dilakukan, maka akan membuat “stress” para penikmatnya. *Fraud* berawal dari proses pembiasaan, akhirnya menjadi kebiasaan dan berujung kepada sesuatu yang sudah terbiasa untuk dikerjakan oleh pejabat-pejabat Negara. Tak urung kemudian, banyak masyarakat yang begitu pesimis dan putus asa terhadap upaya penegakan hukum untuk menumpas para pelaku di Negara kita.

Fraud mencakup penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campuran tangan, dan penipuan. *Fraud* menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, *fraud* mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Secara umum, *fraud* mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. *Fraud* juga mempersulit pembangunan ekonomi, mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan menimbulkan

distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek *fraud*, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. *Fraud* juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur, serta menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Indonesia saat ini masih menjadi salah satu negara dengan peringkat korupsi yang tinggi di dunia (*Transparency International*, 2016). Di Indonesia, korupsi dibuktikan dengan adanya likuidasi beberapa bank, diajukannya manajemen BUMN dan swasta ke pengadilan, kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, korupsi pada instansi pemerintah pusat maupun daerah. Meski permasalahan ini diduga sudah menahun, namun belum terdapat kajian teoritis dan empiris pada satu bidang ilmu tertentu secara komprehensif yang dapat menanggulangi permasalahan secara menyeluruh. Oleh karenanya fenomena ini tidak cukup hanya dikaji oleh satu bidang ilmu saja, tetapi perlu malibatkan disiplin ilmu yang lain. Salah satu bentuk pencegahan *fraud* adalah melalui pengembangan sistem informasi. Beberapa lembaga negara di Indonesia seperti BPKP, KPK, dan beberapa Kementerian/Lembaga sudah mulai memahami hakikat perlunya memiliki sebuah sistem pencegahan *fraud* yang sistematis dan menghubungkannya dengan pengembangan sistem informasi

Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya dengan *whistleblowing system*, pencatatan transaksi aset dan keuangan berbasis sistem komputer, maupun berbagai langkah lainnya. Namun beberapa upaya tersebut belum secara optimal berpengaruh dalam pencegahan *fraud*, buktinya tingkat korupsi di Indonesia masih saja tinggi bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari penindakan kasus yang ditangani KPK pada kurun waktu 2012-2016 seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Penindakan Kasus oleh KPK Periode 2012-2016

Jenis Penindakan	2016	2015	2014	2013	2012
Penyelidikan	96	87	80	81	77
Penyidikan	140	106	95	102	72
Penuntutan	111	95	77	73	63

Sumber: Laporan Tahunan KPK

Anggaran negara yang sangat besar telah bergulir semenjak Januari Tahun 2014 melalui kebijakan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini akan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terlebih lagi pada Tahun 2019 pemerintah mencanangkan negara Indonesia mencapai Universal Health Coverage (UHC) yaitu program yang memastikan bahwa seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses tanpa mengalami kesulitan finansial. Kebijakan pemerintah ini sangat berpotensi memunculkan *fraud* dalam memperoleh manfaat program layanan kesehatan (Arifin, 2015:1). *Fraud* selama tahun 2010 s/d 2016 berdasarkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) korupsi di rumah sakit telah mencapai 824.2 Milyar dengan 204 kasus (Ardyanto, 2016:16)

Potensi kerugian sebesar Rp 19,48 triliun untuk permasalahan JKN, ditemukan pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II-2016 yang disebabkan oleh 155 pemerintah daerah (pemda) yang program jaminan kesehatannya belum terintegrasi dengan program jaminan kesehatan nasional sehingga mengakibatkan jumlah dan fasilitas sumber daya manusia belum memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan yang (Aziz, 2017:1).

Pencegahan yang selama ini diupayakan pemerintah, hingga saat ini terbukti belum optimal, dikarenakan pelaksanaan kerja yang tidak optimal walaupun beberapa fasilitas kesehatan telah membentuk tim pencegahan kecurangan, Juliantari (2017:2). Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan dalam organisasi perlu adanya langkah perubahan bagi organisasi salah satunya melalui inovasi (Moore & Hartley, 2008:4). Pencegahan kecurangan merupakan salah satu masalah yang sangat penting. Menurut Garud, Nayar, & Shapira (1997:15) inovasi adalah suatu proses yang mengarah pada perubahan dalam produk, layanan, organisasi, sektor industri atau wilayah sebagai hasil dari gagasan baru yang sedang dikembangkan menjadi sesuatu yang berharga diperlukan untuk perubahan atas suatu organisasi.

Satu penyebab utama kegagalan dan keterbelakangan negara adalah pemerintahan yang buruk, oleh karenanya untuk mendukung tata pemerintahan inovasi dan reformasi di bidang aparatur pemerintah dan birokrasi merupakan prasyarat penting untuk pembangunan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi (Ciborra & Navarra, 2005:1). Sebagai bukti bahwa inovasi dalam pemerintahan telah menjadi bagian penting dari tingkat keseluruhan inovasi di pemerintahan mudah ditemukan melalui

kecenderungannya berfokus pada jenis inovasi yang merupakan inovasi produk dan proses (Moore & Hartley, 2008:6).

Sistem informasi adalah serangkaian prosedur formal, di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan kepada penggunanya (Hall, 2011:7). Sistem informasi juga merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan dan berfungsi untuk mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan dan menyebarkan data maupun informasi sehingga informasi tersebut dapat menjadi umpan-balik untuk memenuhi sebuah tujuan (Stair & Reynolds, 2012: 4). Inovasi sistem informasi didefinisikan sebagai penerapan IT organisasi prosesnya dibuat lebih efisien dan efektif (Swanson, 1994:1072). Selanjutnya Irani & Kamal (2016:251) mengungkapkan bahwa teknologi inovatif, seperti layanan federasi dan komputasi, dapat sangat berkontribusi melalui sistem yang mudah diukur dan fleksibel terhadap penyediaan layanan *e-government* yang selanjutnya dapat memfasilitasi dalam pengurangan biaya dan mengatasi segmentasi informasi publik. Untuk menyukseskan program JKN, pemerintah saat ini melakukan Sistem yang terintegrasi selain dapat memberikan manfaat dalam mencegah kecurangan, diharapkan dapat menciptakan tata kelola pelayanan publik

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (2008) mengungkapkan bahwa *Tata Kelola Pelayanan Publik atau Good Public Governance (GPG)* merupakan sistem atau aturan perilaku terkait dengan pengelolaan kewenangan oleh para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung-jawab dan akuntabel. GPG harus dilaksanakan oleh para penyelenggara negara di setiap lembaga negara, baik di ranah legislatif dan pengawasan, eksekutif maupun yudikatif, bahkan juga di lembaga-lembaga non struktural. Selanjutnya, Sedarmayanti (2012:3) mengungkapkan, kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman: Pertama: nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (Nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua: Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Direktur Tindak Pidana Korupsi, Bareskrim Polri, Brigjen. Pol. Erwanto Kurniadi mengatakan bahwa pencegahan korupsi dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan

undang-undang pencegahan korupsi, menciptakan strategi dan inovasi-inovasi seperti pelayanan online, menerbitkan standar pelayanan prosedur penerbitan izin yang ringkas dan terintegrasi dengan Kementerian/Lembaga lain yang terkait, pemberian sanksi tegas bagi ASN yang kedapatan melakukan tindak pidana korupsi (Setiawan, 2019:2). Demikian juga dengan yang diungkapkan oleh Gubernur Papua Barat yang melalui wakil bupati Raja Ampat, Manuel Piter Urbinas, mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, langkah pencegahan yang dilakukan dengan sosialisasi mengenai pencegahan korupsi dalam menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta agar aktualisasi fungsi penegakan hukum dapat tercapai (A. L. Rahman, 2019: 1)

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes mengungkapkan bahwa Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Jaminan Kesehatan Nasional dapat lebih mendorong terciptanya Penyelenggaraan program JKN yang transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*) mencapai *universal health coverage*. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pengembangan sistem informasi rumah sakit dalam rangka peningkatan layanan kesehatan publik di Indonesia Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah penelitian dapat kami rumuskan sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Inovasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit terhadap Pencegahan *Fraud* ?
2. Seberapa besar pengaruh Inovasi Sistem Informasi Rumah Sakit terhadap *Good Public Governance* melalui Pencegahan *Fraud* ?

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

Sistem Informasi adalah suatu sistem dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi suatu organisasi dan menyediakan pihak-pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan (Sutabri, 2012:46). Selanjutnya diungkapkan bahwa sistem informasi adalah sistem informasi yang ditunjukkan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada dalam perusahaan. Manajemen

membutuhkan informasi untuk mengambil keputusan yang dibutuhkan (Sutabri, 2012:46).

Salah satu jenis sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan adalah Sistem Informasi Manajemen (SIM). Sistem Informasi Manajemen adalah sistem formal tentang pelaporan, penggolongan dan penyebaran informasi kepada orang-orang yang tepat dalam organisasi (Ahmad & Munawir, 2018: 94). Sementara itu menurut Setyawan & Supriyanto (2013: 225) SIM adalah metode formal dalam menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen, yang diperlukan untuk mempermudah mengambil keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan, pengendalian dan operasional secara efektif. Saat ini sistem informasi yang digunakan lebih berbasis computer dengan harapan informasi yang dihasilkan lebih akurat, berkualitas dan tepat waktu, sehingga pengambilan keputusan dapat lebih efektif dan efisien (Ahmad & Munawir, 2018:26). Senada dengan yang diungkapkan oleh Setyawan & Supriyanto (2013: 225) bahwa rumah sakit saat ini hampir semua sudah menerapkan sistem informasi rumah sakit berbasis komputer untuk manajemen keuangan. Salah satu keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan SIM adalah terhindarnya dari kesalahan yang dilakukan dengan sengaja (*human error*) sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu (Ahmad & Munawir, 2018:26)

Inovasi adalah proses perubahan suatu produk industri atau hasil dari gagasan baru yang sedang dikembangkan (Newton *et al.*, 2009:15). Sementara itu menurut Council (2002:46) inovasi adalah pengembangan produk, atau layanan baru. Inovasi diartikan sebagai pengenalan elemen baru dalam pelayanan publik yang bukan merupakan kelanjutan masa lalu (Osborne & Brown, 2005:6). Demikian pula dengan Rogers (1983:11) yang mengungkapkan bahwa inovasi adalah ide, atau hal yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Selanjutnya, Adair (2007:5) mengungkapkan bahwa inovasi adalah pengenalan beberapa perangkat baru, metode, atau gagasan baru.

Fraud

Fraud didefinisikan sebagai suatu perbuatan sengaja untuk menipu atau membohongi, suatu tipu daya atau cara-cara yang tidak jujur untuk mengambil atau menghilangkan uang, harta, hak yang sah milik orang lain baik karena suatu tindakan atau dampak yang fatal dari tindakan itu sendiri. (Arens *et al.*, 2014). Menurut Razaee and Riley (2010), *Fraud* adalah tindakan

melawan hukum, penipuan berencana dan bermakna ketidak jujur.

Fraud dapat terdiri dari berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana kerah putih (*white collar crime*), antara lain pencurian, penggelapan aset, penggelapan informasi, penggelapan kewajiban, penghilangan atau penyembunyian fakta, termasuk korupsi.

Pencegahan *Fraud*

Menurut COSO (1987:9) pencegahan kecurangan dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilaksanakan manajemen dalam penetapan kebijakan, sistem dan prosedur yang dapat meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang handa, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Dalam meningkatkan tata kelolaperusahaan, pencegahan *fraud* sangatlah penting (Biegelman & Bartow, 2012:23). Pencegahan *fraud* menurut (Zimbelman *et al.*, 2014:397) adalah cara yang paling efektif untuk mengurangi kerugian akibat kecurangan. Selanjutnya menurut Singleton & Singleton (2010:31) pencegahan penipuan adalah pengawasan yang cukup serta tingginya kejujuran pribadi dan transaksi yang adil pada lingkungan kerja.

Tata Kelola Pelayanan Publik

Menurut Kooiman (993:2) *Tata Kelola* adalah semua aktivitas aktor sosial, politik dan administratif yang bertujuan untuk membimbing, mengarahkan, mengendalikan atau mengelola masyarakat (sektor atau bidang). Kemudian Stoker (1998:17) mengungkapkan bahwa *governance* adalah mekanisme pengelolaan yang baik. Selanjutnya diungkapkan pula oleh Stoker, bahwa konsep *governance* adalah menciptakan struktur yang sesuai kebutuhan. Selanjutnya *governance* diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya dan memecahkan masalah-masalah publik (Sumarto, 2009:15).

METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Inovasi Sistem Informasi Rumah Sakit, Pencegahan *Fraud* dan *Tata Kelola Pelayanan Publik*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Penelitian ini menjelaskan karakteristik Sistem Informasi Rumah Sakit, Pencegahan *Fraud* dan *Tata Kelola Pelayanan Publik*

Populasi (*theoretical population*) dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit pemerintah di Sumatera Bagian Selatan Unit analisis dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Sumatera Selatan. Unit observasi, meliputi tim pencegahan kecurangan FKRTL/ Rumah Sakit yang terdiri dari Unsur Satuan Pemeriksaan Internal, Komite Medik, Perkam Medis, Koder (Pasal 2 ayat 1), Responden penelitian pada Rumah Sakit Umum Daerah di Indonesia adalah (a) Kepala Satuan Pemeriksaan Internal (b) Kepala Komite Medik (c) Kasubag Rekam Medik (d) Kepala Koder (e) Bagian Akuntansi

Pada penelitian lapangan (*field study*) pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Masing-masing unit analisis akan dikirimkan kuesioner untuk 5 (lima) responden melalui pos serta wawancara pada beberapa rumah sakit melalui media komunikasi telepon dan datang langsung Metode analisis yang digunakan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian menggunakan metode analisis analisis verikatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti sehingga diperoleh pemecahan masalah yang dapat menjadi saran secara operasional. Sementara itu analisis verifikatif dilakukan menggunakan pemodelan persamaan *Structural Equation Model Partial Least Square (SEM PLS)* untuk mengetahui hubungan antar variabel melalui pengujian hipotesis sehingga dapat menjawab rumusan masalah, dan menjawab hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model Pengukuran

Penelitian ini menggunakan pengujian dua tingkat dengan pendekatan *Confirmatory Faktor Analysis (CFA)* dua tingkat. Tingkat pertama (*first order*) menunjukkan hubungan antar indicator dengan dimensinya. Sedangkan tingkat kedua (*second order*) menunjukkan hubungan antara dimensi dengan variabel penelitian. Berikut penjelasan hasil pengukuran CFA yang dimaksud

CFA Variabel Inovasi sistem informasi manajemen (X)

Inovasi sistem informasi manajemen (X) diukur dengan 5 dimensi dan terdiri dari 12 indikator. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas masing-masing indikator dalam mengukur variabel latennya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2
Ringkasan Uji Validitas Reliabilitas Model Pengukuran Variabel Inovasi sistem informasi manajemen (X)

Variabel Laten	Indikator	Bobot Faktor	T statistik	Kesimpulan	AVE	CR	Kesimpulan
First Order							
Keterbaruan (X1)	X1.1	0,8573	24,353	Valid	0,735	0,847	Reliabel
	X1.2	0,8569	32,127	Valid			
Keunggulan Relatif (X2)	X2.1	0,836	21,064	Valid	0,675	0,861	Reliabel
	X2.2	0,835	14,626	Valid			
	X2.3	0,793	28,122	Valid			
Kompabilitas (X3)	X3.1	0,945	88,937	Valid	0,911	0,953	Reliabel
	X3.2	0,963	189,794	Valid			
Dapat diujicoba (X4)	X4.1	0,956	49,204	Valid	0,917	0,957	Reliabel
	X4.2	0,959	60,938	Valid			
Kemampuan untuk diamati (X5)	X5.1	0,886	34,787	Valid	0,768	0,908	Reliabel
	X5.2	0,869	26,419	Valid			
	X5.3	0,873	20,678	Valid			
Second Order							
Inovasi sistem informasi manajemen (X1)	X1	0,638	9,904	Valid	0,660	0,906	Reliabel
	X2	0,787	12,969	Valid			
	X3	0,876	54,265	Valid			
	X4	0,898	40,041	Valid			
	X5	0,836	16,352	Valid			

Sumber : Penulis,

Tabel diatas merupakan rekapitulasi hasil bobot faktor *second order* dan *first order* variabel Inovasi sistem informasi manajemen (X) lebih besar dari 0,50. Artinya semua indikator sudah valid sebagai alat ukur. Dilihat dari nilai $CR \geq 0,7$ dan nilai $AVE \geq 0,5$ sehingga reliable. Hal menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut valid dan handal dalam mengukur variabel Inovasi sistem informasi manajemen (X).

CFA Variabel Pencegahan Fraud (Y)

Pencegahan *Fraud* (Y) diukur dengan 2 dimensi dan terdiri dari 7 indikator. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas masing-masing indikator dalam mengukur variabel latennya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3
Ringkasan Uji Validitas Reliabilitas Model Pengukuran Variabel Pencegahan *Fraud*

Variabel Laten	Indikator	Bobot Faktor	T statistik	Kesimpulan	AVE	CR	Kesimpulan
First Order							
Mengembangkan proses pengawasan yang tepat (Y1)	Y1.1	0,821	21,804	Valid	0,683	0,866	Reliabel
	Y1.2	0,832	26,724	Valid			
	Y1.3	0,828	30,096	Valid			
Mengeliminasi kesempatan terjadinya kecurangan (Y2)	Y2.1	0,785	15,739	Valid	0,637	0,875	Reliabel
	Y2.2	0,746	15,520	Valid			
	Y2.3	0,861	31,321	Valid			
	Y2.4	0,795	21,354	Valid			
Second Order							
Pencegahan Fraud (Y)	Y1	0,924	44,608	Valid	0,880	0,936	Reliabel
	Y2	0,953	79,482	Valid			

Tabel diatas merupakan rekapitulasi hasil bobot faktor *second order* dan *first order* variabel

Pencegahan *Fraud* (Y) lebih besar dari 0,50. Artinya semua indikator sudah valid sebagai alat ukur. Dilihat

dari nilai CR $\geq 0,7$ dan nilai AVE $\geq 0,5$ sehingga reliable. Hal menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut valid dan handal dalam mengukur variabel Pencegahan *Fraud* (Y).

CFA Variabel Tata kelola pelayanan publik (Z)

Tata kelola pelayanan publik (Z) diukur dengan 3 dimensi dan terdiri dari 10 indikator. Hasil pengujian validitas dan reliabilitas masing-masing indikator dalam mengukur variabel latennya disajikan pada tabel berikut.

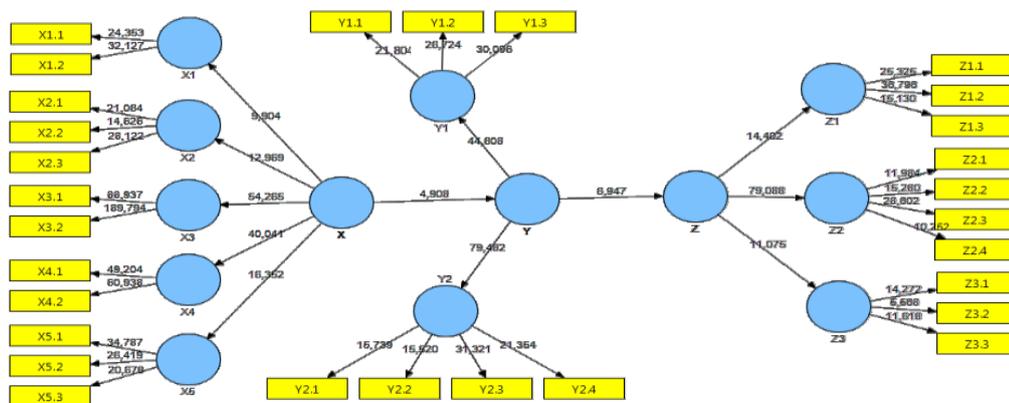
Tabel 4
Ringkasan Uji Validitas Reliabilitas Model Pengukuran Variabel Tata kelola pelayanan publik

Variabel Laten	Indikator	Bobot Faktor	T statistik	Kesimpulan	AVE	CR	Kesimpulan
First Order							
Transparansi (Z1)	Z1.1	0,858	25,325	Valid	0,673	0,860	Reliabel
	Z1.2	0,858	36,796	Valid			
	Z1.3	0,739	15,130	Valid			
Akuntabilitas (Z2)	Z2.1	0,765	11,984	Valid	0,558	0,833	Reliabel
	Z2.2	0,740	15,280	Valid			
	Z2.3	0,850	28,602	Valid			
	Z2.4	0,614	10,252	Valid			
Asas kesetaraan dan kewajaran (Z3)	Z3.1	0,872	14,272	Valid	0,765	0,907	Reliabel
	Z3.2	0,893	5,568	Valid			
	Z3.3	0,858	11,618	Valid			
Second Order							
Tata Kelola Pelayanan publik (Z)	Z1	0,768	14,402	Valid	0,751	0,927	Reliabel
	Z2	0,955	79,088	Valid			
	Z3	0,789	11,075	Valid			

Tabel diatas merupakan rekapitulasi hasil bobot faktor *second order* dan *first order* variabel Tata Kelola Pelayanan Publik (Z) lebih besar dari 0,50. Artinya semua indikator sudah valid sebagai alat ukur. Dilihat dari nilai CR $\geq 0,7$ dan nilai AVE $\geq 0,5$ sehingga reliable. Hal menunjukkan bahwa indikator-indikator tersebut valid dan handal dalam mengukur variabel Tata Kelola Pelayanan Publik (Z).

Hasil Pengujian Full Model Struktural

Dalam penelitian ini model struktural terkait dengan tiga hipotesis penelitian yang mengisyaratkan hubungan kausalitas diantara variabel-variabel laten. Hasil estimasi full model struktural dengan menggunakan metode *second order* disajikan dalam gambar berikut



Gambar 1
Hasil full model Struktural (T Values)

Berikut rangkuman hasil estimasi model struktural hubungan antar variabel laten melalui uji koefisien Jalur

Tabel 5
Hasil Evaluasi Model Struktural

Hipotesis	Hubungan	Koefisien Jalur	T-value	R-square
1	X -> Y	0,344	4,908	0,119
2	Y -> Z	0,514	6,947	0,264
3	X -> Y -> Z	0,177	4,222	0,031

Melalui hasil rekapitulasi yang terdapat pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Pencegahan Fraud (Y) dapat dijelaskan oleh variabel Inovasi sistem informasi manajemen (X) sebesar 11,9%. Sedangkan Tata Kelola Pelayanan publik (Z) dapat dijelaskan oleh variabel Pencegahan Fraud (Y) sebesar 26,4%. Kemudian, pengaruh tidak langsung dari variabel Inovasi sistem informasi manajemen (X) terhadap Tata Kelola Pelayanan publik (Z) melalui Pencegahan Fraud (Y) sebesar 3,1%.

Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis 1

Hipotesis pertama yang diuji adalah pengaruh Inovasi sistem informasi manajemen terhadap Pencegahan Fraud. Pada Tabel hasil evaluasi mode struktural dapat diketahui bahwa koefisien jalur antara Inovasi sistem informasi manajemen (X) terhadap Pencegahan *Fraud* (Y)

sebesar 0,344 dengan arah positif. Artinya semakin tinggi Inovasi sistem informasi manajemen maka Pencegahan Fraud juga akan meningkat, sebaliknya semakin rendah Inovasi sistem informasi manajemen maka Pencegahan Fraud akan mengalami penurunan. Selanjutnya koefisien jalur tersebut diuji untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari variabel Inovasi sistem informasi manajemen terhadap Pencegahan Fraud. Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut melalui hipotesis statistik sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan Inovasi sistem informasi manajemen terhadap Pencegahan Fraud.

H1 : Terdapat pengaruh signifikan Inovasi sistem informasi manajemen terhadap Pencegahan Fraud

Tabel 6
Hasil Pengujian Pengaruh Inovasi sistem informasi manajemen terhadap Pencegahan Fraud

Koef. Jalur	Tstatistik	tkritis	H1
0,344	4,908	1,96	diterima

Berdasarkan tabel diatas dapat dapat diketahui perolehan nilai tstatistik variabel Inovasi sistem informasi manajemen sebesar 4,908 lebih besar dari tabel (1,96). Karena nilai tstatistik (4,908) lebih besar dibanding tabel (1,96), maka pada tingkat kekeliruan 5% (Two tail) diputuskan untuk menolak H0 dan menerima H1. Sehingga berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan Inovasi sistem informasi manajemen terhadap Pencegahan Fraud.

Uji Hipotesis 2

Hipotesis kedua yang diuji adalah pengaruh Pencegahan *Fraud* terhadap Tata Kelola Pelayanan publik. Pada Tabel hasil evaluasi model struktural dapat diketahui bahwa koefisien jalur antara Pencegahan *Fraud* (Y) terhadap Tata Kelola

Pelayanan publik (Z) sebesar 0,514 dengan arah positif. Artinya semakin baik Pencegahan *Fraud* maka Tata Kelola Pelayanan publik juga akan meningkat, sebaliknya semakin rendah Pencegahan Fraud maka Tata Kelola Pelayanan publik akan mengalami penurunan. Selanjutnya koefisien jalur tersebut diuji untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari variabel Pencegahan *Fraud* terhadap Tata Kelola Pelayanan publik.

Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut melalui hipotesis statistik sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan Pencegahan Fraud terhadap TataKelola Pelayanan publik.

H2 : Terdapat pengaruh signifikan Pencegahan Fraud terhadap Tata Kelola Pelayanan publik.

Tabel 7
Hasil Pengujian Pengaruh Pencegahan Fraud terhadap Tata Kelola Pelayanan publik

Koef. Jalur	Tstatistik	tkritis	H2
0,514	6,947	1,96	diterima

Berdasarkan tabel diatas dapat dapat diketahui perolehan nilai tstatistik variabel Pencegahan Fraud sebesar 6,947 lebih besar dari tabel (1,96). Karena nilai tstatistik (6,947) lebih besar dibanding tabel (1,96), maka pada tingkat kekeliruan 5% (Two tail) diputuskan untuk menolak H0 dan menerima H2. Sehingga berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan Pencegahan Fraud terhadap Tata Kelola Pelayanan publik.

Uji Hipotesis 3

Hipotesis ketiga yang diuji adalah pengaruh Inovasi sistem informasi manajemen terhadap Tata Kelola Pelayanan publik melalui Pencegahan *Fraud*. Pada Tabel hasil evaluasi model struktural dapat diketahui bahwa koefisien jalur Inovasi sistem informasi manajemen (X) terhadap Tata Kelola Pelayanan publik (Z) melalui Pencegahan Fraud (Y) sebesar 0,177 dengan arah positif. Artinya semakin tinggi Inovasi sistem informasi manajemen yang disertai semakin baiknya

pencegahan fraud maka Tata Kelola Pelayanan publik akan mengalami peningkatan, sebaliknya semakin rendah Inovasi sistem informasi manajemen yang disertai menurunnya pencegahan *fraud* maka Tata Kelola Pelayanan publik akan mengalami penurunan. Selanjutnya koefisien jalur tersebut diuji untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari variabel Inovasi sistem informasi manajemen terhadap Tata Kelola Pelayanan publik melalui Pencegahan *Fraud*.

Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut melalui hipotesis statistik sebagai berikut:

H0 : Tidak terdapat pengaruh signifikan Inovasi sistem informasi manajemen terhadap Tata Kelola Pelayanan publik melalui Pencegahan *Fraud*.

H3 : Terdapat pengaruh signifikan Inovasi sistem informasi manajemen terhadap Tata Kelola Pelayanan publik melalui Pencegahan *Fraud*

Tabel 8
Hasil Pengujian Pengaruh Inovasi sistem informasi manajemen terhadap Tata Kelola Pelayanan publik melalui Pencegahan Fraud

Koef. Jalur	Tstatistik	tkritis	H3
0,177	4,222	1,96	diterima

Berdasarkan tabel diatas dapat dapat diketahui perolehan nilai tstatistik variabel Inovasi sistem informasi manajemen sebesar 4,222 lebih besar dari tabel (1,96). Karena nilai tstatistik (4,222) lebih besar dibanding tabel (1,96), maka pada tingkat kekeliruan 5% (Two tail) diputuskan untuk menolak H0 dan menerima H3. Sehingga berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan Inovasi sistem informasi manajemen terhadap Tata Kelola Pelayanan publik melalui Pencegahan *Fraud*. Hal ini menunjukkan bahwa Pencegahan *Fraud* memiliki pengaruh yang signifikan dalam memediasi hubungan Inovasi sistem informasi manajemen terhadap Tata Kelola Pelayanan publik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Inovasi sistem informasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan *Fraud* hal ini disebabkan karena saat ini, semenjak diberlakukan program Jaminan Kesehatan Nasional, rumah sakit telah melakukan pembaharuan terhadap Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) Sistem Informasi Rumah sakit saat ini telah ditambahkan beberapa fitur-fitur terkait dengan tarif JKN, jenis layanan, dan paket BPJS. Selain itu sebagian besar Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit telah integrasi dengan INA/CBG,SIRS, sehingga pengembangan SIM RS mampu meningkatkan kualitas proses pelayanan rumah.
2. Inovasi sistem informasi manajemen berpengaruh signifikan terhadap Tata Kelola

Pelayanan publik melalui Pencegahan *Fraud*. Hal ini disebabkan karena pembaharuan terhadap Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) dapat meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Rumah sakit melalui pencegahan *fraud* yaitu melalui tindakan rapat pimpinan tiap bulan yang terkait dengan pencegahan *fraud*, pemeriksaan atas pelaksanaan program JKN oleh pihak internal dan eksternal rumah sakit, terdapat *punishment* (hukuman) jika terbukti melakukan *fraud*. sakit yang akurat, terpadu dan akuntabel

3. Pencegahan *Fraud* berpengaruh signifikan terhadap Tata Kelola Pelayanan publik hal ini disebabkan karena telah terdapat pengawasan yang baik dari manajemen rumah sakit dan rutin dilakukan audit internal dan eksternal yang sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja rumah sakit

DAFTAR PUSTAKA

- Adair, J. (2007). *Leadership For Innovation How to Organize Team Creativity and Harvest Idea* (Second). London: London and Philadelphia.
- Ahmad, L., & Munawir. (2018). *Sistem Informasi Manajemen* (1st ed.; Syarifuddin, Ed.). Retrieved from <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=VFFQD2eHGYC&oi=fnd&pg=PR14&dq=sistem+informasi+manajemen&ots=Us6ZF2H24Z&sig=dFy9H3EPK6Wjv8ArMZMTAB3VSl0#v=onepage&q=sistem+informasi+manajemen&f=false>
- Ardyanto, T. D. (2016). *Rs Dan Fraud Dalam Jkn: Profesional, Moral Dan Maslahat*. Solo: Rumah Sakit UNS.
- Arifin, P. (2015). *KPK Terus Monitor Pengelolaan Dana JKN*. Retrieved from <https://www.ugm.ac.id/Berita/9917-kpk>. Terus Monitor Pengelolaan Dana. Jkn, pp.2011-2013.
- Aziz, H. A. (2017). *Audit BPK Temukan Potensi Kerugian*. (April). Retrieved from <http://ekbis.rmol.co/read/2017/04/18/288083/Audit-BPK-Temukan-Potensi-Kerugian-Negara-Rp-19,48-T>
- Biegelman, M. T., & Bartow, J. T. (2012). *Executive Road Map to Fraud Prevention and Internal Control* (Second). John Wiley.
- Ciborra, C., & Navarra, D. D. (2005). Good Governance, Development Theory, and Aid Policy: Risks and Challenges of e-Government in Jordan. *Information Technology for Development*, 11(2), 141–159. <https://doi.org/10.1002/itdj.20008>
- COSO. (1987). *Report of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting*. Retrieved from http://0-scholar.google.co.za.innopac.up.ac.za/scholar?q=treadway+report&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5#0
- Council, N. R. (2002). *Innovation in Information Technology* (1st ed.). Washington DC: The National Academies Press.
- Garud, R., Nayyar, P. R., & Shapira, Z. B. (1997). *Technological innovation: Oversights* (1st ed.). England: Cambridge University Press.
- Irani, Z., & Kamal, M. (2016). Transforming Government: People, Process, and Policy. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 10(2), 190–195. <https://doi.org/10.1108/TG-03-2016-0016>
- Kooiman, J. (1993). *Modern Governance* (1st ed.). London: Sage Publisher. Moore, M., & Hartley, J. (2008). Innovations in governance. *Public Management Review*, 10(1), 3–20. <https://doi.org/10.1080/147190307017>
- Newton, P., Hampson, K., & Drogemuller, R. (2009). *Technology, Design and Process Innovation in the Built Environment*. London: Taylor and Francis.
- Osborne, S. P., & Brown, K. (2005). Managing Change and Innovation In Public Service Organizations. In *Routledge*. (First Edition). <https://doi.org/10.4324/9780203391129>
- Rahman, A. L. (2019). *Waspada Kasus Korupsi ASN Di Raja Ampat dibekali Undang-Undang Korupsi*. pp. 1–2. Retrieved from <https://www.teropongnews.com/waspada->

- kasus-korupsi-asn-di-rajaampat- dibekali-
undang- undang-korupsi/%0AWaisai,
- Rogers, E. M. (1983). *Diffusion Of Innovations* (Third Edit). <https://doi.org/82-70998>
- Setiawan, R. (2019). *Cegah Korupsi, Ditjen Perhubungan Laut Gandeng Bareskrim Polri*. 2. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/4502769/cegah-korupsi-ditjen-perhubungan-laut-gandeng-bareskrim-polri>
- Setyawan, F. E. B., & Supriyanto, S. (2013). Manajemen Rumah Sakit. In *Blogspot* (1st ed.). Retrieved from <http://nurjanahmatkul.blogspot.co.id/2013/12/sanitasi-rs.html>
- Stoker, G. (1998). Governance as theory: five propositions. *International Social Science Journal*, 50(155), 17–28. <https://doi.org/10.1111/1468-2451.00106>
- Sumarto, H. S. (2009). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance* (1st ed.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sutabri, T. (2012). Konsep Sistem Informasi. In Inunk Nastiti (Ed.), *Andi Offset* (1st ed., Vol. 3). Yogyakarta: Andi Offset.
- Swanson, E. B. (1994). Information Systems Innovation Among Organizations. *Management Science*, 40(9),1069–1092. <https://doi.org/10.1287/mnsc.40.9.1069>
- Zimbelman, M. F., Albercht, C. C., Albercht, W. S., & Albercht, C. O. (2014).